



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indonesia	Pusat Kota	Wali Kota

Biarkan Gubernur Saja yang Mengurus

Baru Membuat Roadmap Padahal 2021 Darurat Sampah

JAKARTA – Usaha Partai NasDem memenangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengurus ibu kota, terutama soal sampah, mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagai orang nomor satu di dalam pemerintahan provinsi, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu meminta agar dirinya saja.

Menurut Anies, Jakarta harusnya diurus oleh Pemprov dalam hal ini dirinya sebagai gubernur, serta DPRD DKI Jakarta, di mana, Bestari Baru selaku anggota dari Fraksi Partai NasDem juga terlibat di dalamnya. "Kita apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian, biarlah Jakarta diurus oleh DPRD Jakarta. Oleh Pemprov Jakarta. Jadi, Pak Bestari itu mungkin lagi siap-siap mau pensiun," ujar Anies saat diwawancarai oleh wartawan di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Anies juga menyinggung pernyataan Bestari soal pengelolaan sampah di Jakarta. Menurut Anies, pernyataan itu menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur ■

"Sebetulnya Pak Bestari itu menceritakan pengolahan sampah selama ini. Saya sedang mengubah. Sebelum saya bertugas, tidak ada pengelolaan ITF (Intermediate Treatment Facility). Sekarang kita mulai ada ITF, lagi diproses," ujar pria berusia 50 tahun tersebut.

"Pak Bestari itu membicarakan Jakarta yang dia ikut tanggung jawab kemarin. Jadi, beliau suka lupa, maunya nyerang gubernur yang sekarang. Lupa ini nyerang gubernur yang sebelum-sebelumnya tuh," tambah dia.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota. Dia nantinya akan mengumumkan roadmap itu secara lengkap. "Sebagai gubernur yang bertugas, saya akan melakukan perubahan dan roadmap-nya sedang disiapkan. Begitu roadmap-nya selesai, dijalankan," ucap Anies.

Kejar Target Pembangunan ITF

Sementara itu, Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan pemprov juga berencana membangun tiga ITF lagi yang berada di Cakung Cilincing, Cengkareng, dan Marunda. Saat ini, ITF yang sedang dibangun berada

di Sunter, Jakarta Utara. "Ada tiga ITF lagi yang akan kita bangun di Cakung Cilincing, Cengkareng, dan Marunda," kata Asep.

Ia menambahkan pembangunan tiga ITF tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada DKI Jakarta. Asep mengatakan, masing-masing ITF itu

sendiri dapat mengolah 2.200 ton sampah setiap harinya atau 25-30 persen dari jumlah sampah yang ada di Jakarta. Dengan menghasilkan tenaga listrik sebesar 35 Megawatt (MW) yang akan dibeli oleh PT PLN. Untuk pembangunannya, pihaknya menargetkan selesai pada 2023 dan memakan biaya sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat.

Proyek yang dikerjakan PT Jakarta Propertindo itu bekerja sama dengan perusahaan asal Finlandia, Fortum Power yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto, menjelaskan, salah satu instrumen pembangunan ITF adalah Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

"Salah satu keunggulan ITF adalah kemampuan untuk mereduksi volume sampah hingga 90 persen untuk menghasilkan energi listrik sebesar 35 MW per jam. Selain itu, kami juga selalu berkoordinasi dengan para pegiat dan konsultan agar tetap memperhatikan aspek lingkungan," ujar Dwi.

Namun, karena pembangunan ITF Sunter terlalu lama, anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendesak pemprov lebih serius menangani masalah sampah. Karena ibu kota diperkirakan mengalami darurat sampah tahun 2021.

"Pemprov itu sama SKPD agak seringlah datang ke Bantargebang untuk melihat penumpukan sampah yang sudah overload sampai 2021. Mau diapain kalau

misalnya Bantargebang ditutup, tidak bisa menerima sampah lagi?" tanya Pandapotan.

Untuk Pemprov DKI Perjujukan mendesak agar Pemprov DKI segera menyelesaikan pembangunan ITF Sunter. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menyayangkan pembangunan ITF Sunter belum terealisasi padahal peletakan batu pertama sudah dilakukan pada Desember 2018. "Saya jadi curiga investasi untuk melaksanakan pembangunan ITF Sunter itu kenapa tidak jalan. Jangan-jangan investasi belum ada. Belum ada dananya," ucapnya.

Ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terbangun kesadaran dalam pengolahan sampah dari hulu hingga hilir. Mulai dari pemilahan hingga reproduksi, sembari membangun ITF di Sunter.

Keberadaan ITF Sunter itu diharapkan akan mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang diperkirakan akan penuh tahun 2021 sehingga itu dianggap darurat sampah bagi Jakarta.

Karena Surabaya Mampu Berhemat

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Baru menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma sangat baik mengelola Surabaya. Ia pun secara terang-terangan tertarik untuk memboyong Risma ke Jakarta pada Pilkada 2022 mendatang.

Hal itu ia ungkapkan saat studi banding DPRD Provinsi DKI untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep ITF, Senin (29/7): "Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau di pilkada yang akan datang

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Biarkan Gubernur Saja yang Mengurus

Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari di Surabaya.

Menurut Bestari, pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional, yakni dengan cara ditumpuk di TPST Bantargebang. "Namun pada 2021 nanti, TPA tersebut akan mengalami overload, sehingga dibutuhkan teknologi pengelolaan seperti di Kota Surabaya," ujar dia.

Menanggapi hal ini, Risma mengatakan selalu berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang nilainya jauh lebih sedikit ketimbang DKI Jakarta.

"Di Surabaya setiap hari kami memberikan 35 ribu orang makanan gratis, untuk anak yatim, lansia, miskin. Dan itu ternyata dengan uang satu per sepuluh anggaran DKI Jakarta,"

kata Risma saat ditemui di Soehana Hall The Energy Building, Jakarta, Rabu (31/7).

Risma mengaku Pemkot Surabaya dengan APBD yang hanya berkisar Rp9,5 triliun atau sepersepuluh dari nilai APBD Pemprov DKI Jakarta yang mencapai angka Rp89,08 triliun justru mampu melakukan berbagai terobosan yang tidak dilakukan oleh ibu kota. "Memang iya uang kami sedikit sekali jadi kami harus hemat," ujarnya.

Risma menjelaskan, penghematan itu dilakukan dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan melalui teknologi sehingga bisa menekan dana hingga 29 persen. "Warga Surabaya kalau sakit sudah tidak bingung karena semua sudah melalui handphone. Mulai dari mendapat nomor antrean untuk periksa hingga pengam-

bilan obat," terangnya.

Oleh karena itu, Kota Surabaya selama ia menjabat sebagai wali kota sejak 2010 berhasil membangun lebih dari 250 kilometer jalan, 1.400 perpustakaan, 110 sekolah, 70 lapangan olahraga, hingga 70 taman kota per tahun. "Itu adalah penghematan dari pengelolaan keuangan karena kami menggunakan teknologi dan rinci," ujarnya.

Bahkan, Risma mengatakan bahwa dalam membeli kertas untuk kebutuhan pemerintahan dalam 1 tahun semua harus dihitung dan diperkirakan. Agar bisa semakin meminimalisasi penggunaan dana yang berlebihan.

Menurutnya, jumlah APBD tidak terlalu berpengaruh terhadap kemajuan sebuah daerah. Karena semua tergantung cara pemerintahannya dalam mengelola dana tersebut. (wok/ibl/ant)

JAKARTA

Anggaran

Rp 1086.537.095.446

Rata-rata produksi sampah per hari

7.500 ton

Jumlah bank sampah

1.600 unit

Jumlah Petugas Kebersihan

20.000 orang*
*) data 2017

Sistem pengelolaan saat ini

- ▶ Dikumpulkan di TPST Bantargebang
- ▶ Dimasukkan di bank sampah
- ▶ Sebagian dibakar oleh masyarakat

SURABAYA

Anggaran

Rp 102.157.591.009

Rata-rata produksi sampah per hari

1.600 ton

Jumlah bank sampah

296 unit

Jumlah Petugas Kebersihan

7.000 orang*
*) data 2017

Sistem pengelolaan saat ini

- ▶ Dipilah lalu dimasukkan pada bank sampah dan dikelola rumah kompos
- ▶ Dikumpulkan di TPA Bewono untuk diolah
- ▶ Menjadi biomassa untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah sebesar 10 Megawatt